

**FGD PENYUSUNAN DATASET
PETA RTRW PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA**



Suasana FGD

Pada tanggal 5-6 Juli 2018 Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial (BIG) mengadakan kegiatan FGD I Penyusunan Dataset Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota di Hotel Grand Kemang Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 perwakilan dari Provinsi, Kabupaten dan Kota terpilih di Indonesia. Wilayah terpilih tersebut didasarkan atas kriteria wilayah yang akan diberikan bantuan penyelesaian petanya. Kriteria lain adalah daerah yang memiliki KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan KI (Kawasan Industri), daerah yang sedang berproses revisi RTRW di Kementerian ATR/BPN atau daerah yang sudah melakukan asistensi dan supervisi ke

BIG. Forum ini disambut sangat antusias oleh pemerintah daerah mengingat pada tahun ini sudah banyak yang melakukan revisi perdanya.

Kegiatan ini dibuka oleh Nurwadjadi selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG. Dalam arahannya beliau menyampaikan pentingnya pengawalan dari BIG dalam penyusunan peta RTRW. Hal ini berkaitan dengan sumber data dan peta dasar yang harus sama yaitu Peta RBI. Selain itu juga pengawalan untuk peta tematik, peta rencana hingga album peta. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kebijakan Satu Peta. Turut memberi materi dari BIG, Mulyanto Darmawan, selaku Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas.

Kehadiran Kementerian PPN/Bappenas dalam forum ini semakin mempertegas agar RTRW segera diselesaikan. Elmy Yasinta Ciptadi dari Bappenas memberi paparan terkait dengan Target Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Tahun 2018-2019. Paparan lain dari Kementerian ATR/BPN oleh

Endang Sihetyaningrum dengan materi terkait Sosialisasi Status dan Target Penyelesaian Persetujuan Substansi berdasarkan lokasi Penyusunan Dataset RTRW. Pada saat sesi diskusi, semua peserta sangat antusias menyampaikan pertanyaan-pertanyaan juga terkait permasalahan yang biasa timbul pada proses penyusunan RTRW.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari. Hari pertama pemaparan narasumber dan pemaparan teknis tentang klinik, hari kedua berupa klinik asistensi pemetaan RTRW. Klinik yang di pandu tim teknis BIG bertujuan agar daerah melakukan akselerasi, terutama terkait pengumpulan data tata ruang yang nantinya akan dibantu untuk penyelesaiannya. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah tercapainya 50 surat rekomendasi perpetaan dengan target akhir tahun 2018. [Chintia Dewi, 2018]



Suasana FGD

Provinsi	Kabupaten	RDTR	Tanggal Rekom
Jawa Timur	Nganjuk	Kertosono & Nganjuk	2018-01-24
Bali	Buleleng	Celukan Bawang	2018-01-25
Jawa Timur	Bangkalan	Klampis	2018-01-26
Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	2018-01-29
Sumatera Barat	Padang Pariaman	Tiram	2018-02-15
Papua	Merauke	Distrik Kurik	2018-02-26
Sulawesi Selatan	Gowa	Borongloe & Barombong	2018-03-05
Jawa Tengah	Boyolali	Teras	2018-03-06
Sulawesi Selatan	Sinjai	Lappadata	2018-03-06
Jawa Barat	Tasikmalaya	Singaparna	2018-03-13
Banten	Tangerang	Sindang Jaya	2018-03-13
Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	Lasusua	2018-03-26
Jawa Timur	Malang	Singosari	2018-03-26
Jawa Timur	Blitar	Kanigoro & Sutojayan	2018-04-03
Sulawesi Selatan	Pinrang	Pinrang	2018-04-09
Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	Batubetumpang	2018-04-23
Papua	Boven Digoel	Tanah Merah	2018-05-04
Sulawesi Selatan	Pangkajene Kep.	Kota Pangkajene & Bungoro	2018-05-07
Jawa Timur	Sumenep	Pragaan, Saronggi, Bluto	2018-05-08
Sulawesi Selatan	Soppeng	Watansoppeng	2018-05-08
Papua	Asmat	Agats Distrik Agats	2018-05-17
		Kamur Distrik Pantai Kasuari	
		Binam Distrik Suator	
		Binam Zain Distrik Klot Braza	
Jawa Barat	Kuningan	Kuningan, Kadugede	2018-05-22
		Luragung, Cilimus	
		Ciawigebang	
Bali	Badung	Kuta Selatan	2018-06-04
Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Polewali Mandar	2018-06-05
		Wonomulyo , Campaligian	2018-06-05
Jawa Timur	Sidoarjo	Balombang, Buduran	2018-06-07
		Wonoayu	
Jawa Timur	Ngawi	Paron, Karangjati	2018-07-17
Banten	Tangerang	Jambe	2018-07-24
Sumatera Barat	Padang Pariaman	Kawasan Kayu Tanam	2018-07-27



Terima Kasih Atas Segala Pengabdian Terbaiknya di BAKOSURTANAL / BIG



Drs. Agus Supranoto (Maret 1986 - Agustus 2018)



Puji Yuwono (November 1982 - Juli 2018)



R.A Pujo Cahyono Hadi (Maret 1981 - Mei 2018)



Djudju Darwoto (Maret 1981 - Desember 2017)



Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :
PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.pta@gmail.com
Twitter : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/



**TATA RUANG & ATLAS
NEWSLETTER**

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA, DAN ATLAS

CATATAN BERANDA

Bukan perkara mudah untuk menerapkan peraturan yang ada meskipun payung hukumnya jelas. Hal ini karena masyarakat sudah terbentuk oleh kebiasaan lama. Contohnya dalam hal asistensi dan validasi peta tata ruang oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Sebelum terbitnya UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, penyusunan tata ruang dilakukan tanpa memperhatikan keakuratan peta tata ruangnya sebagai lampiran rancangan peraturan daerah (perda). Akibatnya peta tata ruang yang dihasilkan kurang baik dan benar serta kesulitan pada saat peninjauan kembali karena datanya tidak bisa di edit. Lalu terbitlah dua peraturan tersebut di atas. Lewat peraturan tersebut, daerah wajib melakukan konsultasi peta tata ruangnya sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian ATR/BPN.

Sampai bulan Juli 2018 tercatat sudah 950 peta tata ruang daerah dikonsultasikan ke

BIG. Namun demikian terdapat pula upaya dari beberapa pihak untuk mengecilkan arti penting pemeriksaan peta tata ruang oleh BIG. Berbagai alasan diantaranya masalah peta dasar yang belum tersedia, lamanya waktu konsultasi, keterbatasan SDM dan sebagainya. Bahkan pengecilan peran ini pun dibungkus dengan payung hukum yang dibuat seperti penetapan peta tata ruang tidak memerlukan citra satelit yang di koreksi geometrik atau proses orthorektifikasi. Padahal sudah jelas aturan UU mewajibkan penyusunan peta tata ruang menggunakan peta dasar. Pada skala besar, penyusunan peta tata ruang menggunakan citra satelit yang terkoreksi posisi 'XYZ' nya.

Bagi kami melakukan asistensi bukan sekedar memeriksa peta agar gambarnya indah sekali. Melainkan memberi jaminan atas aspek geometris, tematis, dan kartografis sesuai dengan standar perpetaan yang BIG kembangkan. Hal ini memang tantangan bagi kami di PPTRA dalam mendukung percepatan penyusunan tata ruang yang memperhatikan

keakuratan data dan kebenaran atribut yang dapat dipertanggungjawabkan. Walau demikian kami juga mesti siap-siap percepatan peta tata ruang di era disrupsi ini. Sesuatu yang kami anggap berjalan normal boleh jadi berubah karena masukan teknologi, pergantian orang, perubahan metode, adanya peraturan baru dan kebijakan baru pimpinan. Upaya yang kami lakukan adalah menyiapkan *hard skill* staf, sehingga menjadi staf yang tangguh dan terampil, menyiapkan sistem *online* untuk proses rekomendasi dan memperkuat basis data tematik. Demikian pula bagi program lain tentang dinamika sumberdaya dan pemetaa sosial pada prinsipnya sama, harus siap memasuki era disrupsi bila tidak ingin produknya ditinggalkan pengguna. Karena era disrupsi seperti menghadirkan masa depan di hari ini. Oleh karena itulah, PPTRA berupaya mendokumentasikan potret kegiatan dalam bentuk newsletter yang dapat diunduh, sebuah bagian kecil dari era disrupsi. Alhamdulillah edisi Juli 2018 sudah terbit. Selamat membaca [Mulyanto Darmawan, 2018]

Isu Strategis & Info Kebijakan

Program neraca kapital sumberdaya alam menjadi instrumen penting yang dilakukan oleh sebagian besar negara maju. Sebagai contoh di Uni Eropa, pelaksanaan penyusunan neraca kapital sumberdaya akan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh anggota negara yang masuk dalam Uni Eropa (*European Union*). Hal serupa juga dilakukan oleh negara maju lain seperti Amerika, Jepang, dan Australia. Nilai kapital sumberdaya alam menjadi bagian subsistem dari sistem ekonomi nasional, bahkan sudah masuk pada level yang lebih detail dengan memasukkan klasifikasi *tangible* maupun *intangible* dari setiap komponen sumberdaya alamnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Kita sudah mulai menuju arah program tersebut melalui kegiatan WAVES. WAVES merupakan program penghitungan sumber daya alam (*natural capital accounting*) di negara berkembang tropis yang diinisiasi sejak tahun 2010 oleh Bank Dunia bersama lembaga PBB, lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintah. WAVES memfasilitasi dukungan penerapan *natural capital accounting* dalam sektor lingkungan/SDA tertentu yang memiliki prioritas ekonomi tinggi. Selain itu, WAVES juga memfasilitasi pemahaman SEEA (standar SDA internasional), kaitan laporan SDA (*assets accounts*) dengan *national account*, dan identifikasi ukuran/indikator yang dibutuhkan untuk kebijakan yang efektif. Pihak yang terlibat sebagai *Steering Committee* WAVES di Indonesia yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan. Badan Informasi Geospasial melalui Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya, sampai sejauh ini sudah rutin dilibatkan dalam beberapa pelatihan dalam program peningkatan kapasitas SDM seperti *Training on Macroeconomic*



Sumber: WEF Report, 2014

Indicators pada tahun 2016-2018 yang diselenggarakan oleh Dirjen Kekayaan Negara (DJKN-Kemenkeu).

BIG sampai saat ini sudah menyusun SNI neraca spasial sumberdaya alam yang terdiri dari 4 komponen SDA meliputi; hutan, lahan, air, dan minerba. Kedepan, instrumen spasial ini akan diintegrasikan bersama dalam Sistem Neraca Lingkungan yang dikembangkan oleh BPS dalam kerangka penyediaan informasi fiskal sumberdaya nasional dan daerah.

Dalam rangka mendukung Program Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030, PPTRA-BIG bersama Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I (SUPD I), Kemendagri menyiapkan instrumen neraca spasial sumberdaya alam ini sebagai bagian dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai tindak lanjut dari Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS-RPJMD. [Habib Subagio, 2018]

REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| Editor: Mulyanto Darmawan, Fakhruddin Mustofa , Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Randhi Atiqi, Chintia Dewi |
| Desain Tata Letak: Ika Rosalika |



POTRET KEGIATAN

FGD Pemodelan Dinamika Spasial KSPN Mandalika

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika menjadi salah satu dari 3 KSPN yang menjadi prioritas pemerintah untuk segera dikembangkan dan dibangun infrastrukturnya. Kebijakan dan program untuk pembangunan kawasan muncul dari berbagai K/L terkait. Pembangunan tersebut diharapkan mampu mendorong kawasan di pesisir selatan Lombok ini menjadi daya tarik utama sektor pariwisata nasional. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan pendekatan secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pemodelan dinamika spasial hadir untuk mencoba melakukan pemodelan dengan pendekatan tersebut. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) pemodelan dinamika spasial menjadi langkah awal untuk memperoleh informasi dan masukan terkait pengembangan KSPN Mandalika dan rencana pengembangan infrastruktur pendukung KSPN Mandalika.

FGD ini dilaksanakan tanggal 5 Juli 2018 di Hotel Swiss-Belresidences Kalibata Jakarta. FGD dibuka oleh Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA), Mulyanto Darmawan. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan Prioritas Nasional yang ada untuk mendukung pembangunan KSPN Mandalika. Hadir juga untuk memberi arahan Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas, Uke Muhammad Hussein. Beliau menyampaikan bahwa setiap pemodelan itu spesifik dibangun untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, belum ada model yang mampu menyelesaikan semua masalah.

Oleh karena itu, diharapkan pemodelan ini fokus untuk menjawab terkait kontribusi pariwisata Mandalika terhadap perekonomian nasional. Narasumber yang hadir dari berbagai K/L diantaranya Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas, Oktorialdi, kemudian dari perwakilan Direktorat Penataan Kawasan (ATR/BPN) yaitu Doni Janarto Widiyanto. Turut hadir juga dari Kementerian Pariwisata yaitu Endah Ruswanti, dan Fransisco dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR.

Beberapa informasi dan masukan yang diperoleh terkait pengembangan KSPN ini yaitu KSPN ini muncul dilatarbelakangi keinginan pemerintah untuk membuat suatu kawasan pariwisata sebagai Bali Baru yang diharapkan mampu menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Rencana tata ruang di sekitar kawasan Mandalika (kawasan penyangga) harus segera diselesaikan agar mampu mendukung pembangunan di sekitar kawasan inti Mandalika. Pengembangan KSPN Mandalika saat ini sedang menjadi prioritas nasional sehingga infrastruktur di kawasan tersebut menjadi prioritas untuk segera dibangun. Isu lainnya yang perlu diperhatikan yaitu terkait pengelolaan sampah, ketersediaan air baku, dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung kegiatan pariwisata yang akan dikembangkan. [I Made Dipta, 2018]



Suasana FGD KSPN Mandalika

FGD Pemetaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan

Angka kemiskinan sebesar 9,82 yang dirilis BPS bulan Maret 2018 merupakan angka terendah sejak tahun 1999. Nilai tersebut berarti masih terdapat 25,95 juta penduduk Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan. Di satu sisi, informasi ini merupakan berita yang menggembirakan karena menunjukkan kinerja seluruh elemen. Di sisi lain, masih banyak pekerjaan rumah bersama mendorong penduduk dibawah garis kemiskinan di perdesaan dan perkotaan terentaskan dari jerat kesusahan. Badan Informasi Geospasial turut berperan dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan melalui aktivitas pemetaan sosial (*social mapping*) berbasis kewilayahan.

Tanggal 19 Juli 2018, bertempat di Hotel Le Dian, Kota Serang, berlangsung *focus group discussion* (FGD) Pemetaan Sosial untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan. Forum ini diikuti oleh BIG sebagai penyelenggara, BPS Provinsi Banten, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten, Bappeda dan Dinas Sosial provinsi/kabupaten/kota di seluruh Provinsi Banten. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengikuti acara sangat antusias memberi informasi dan kendala pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan wilayah masing-masing.

Mulyanto Darmawan, Kepala PPTRA BIG yang membuka acara sekaligus memberi materi tentang informasi geospasial tematik mengapresiasi peran aktif OPD. Dalam kesempatan yang sama, beliau mengutarakan bahwa informasi geospasial berperan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Hal ini karena faktor kemiskinan tidak terlepas dari aspek keruangan, lokasi, dan aksesibilitas. Pendapat senada disampaikan oleh Kepala Bappeda Pandeglang, Kurnia Satriawan yang memberi pemaparan kondisi kemiskinan berbasis desa di Kabupaten Pandeglang. [Fakhrudin Mustofa, 2018]



Suasana FGD

Koordinasi Pembinaan Atlas Taktual di Kota Payakumbuh

Pembinaan IGT atlas taktual tahun 2018 akan dilaksanakan di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Sebelum kegiatan pembinaan terlaksana pada bulan Oktober 2018, dilakukan koordinasi dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) tipe A YPPLB Kota Payakumbuh pada tanggal 12 Juli 2018. SLB-A merupakan salah satu jenis SLB yang khusus diperuntukkan bagi siswa penyandang tunanetra. Tujuan dari koordinasi ini untuk koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan, memperoleh informasi terkait siswa tunanetra, dan meninjau kesiapan lokasi untuk dilaksanakan pembinaan atlas taktual.



Penyerahan Atlas Taktual

Kota Payakumbuh menjadi salah satu pusat pendidikan tunanetra di Provinsi Sumatera Barat karena memiliki SLB-A yang cukup besar. Siswa tunanetra yang dibina oleh SLB-A YPPLB Payakumbuh berjumlah 40 orang, terdiri dari siswa kelas 1 SD hingga 3 SMA yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan sekitarnya. Pembinaan atlas taktual diperuntukkan bagi siswa yang sudah mampu membaca huruf braille, yaitu mulai dari kelas 3 SD. Pihak SLB-A YPPLB memberikan saran agar pembinaan tidak hanya diperuntukkan bagi siswa saja, namun juga diberikan pada tenaga pendidik yang membimbing siswa tunanetra. Selain siswa dan tenaga pendidik dari SLB-A YPPLB, pelaksanaan kegiatan ini akan diikuti siswa SLB-A di sekitar Kota Payakumbuh, walaupun jumlah siswa di SLB-A tersebut hanya berkisar 2 - 3 siswa.

SLB-A YPPLB berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu koordinasi juga dilakukan dengan Bidang Pembinaan SLB, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Bidang Pembinaan SLB menyambut baik dan bersedia untuk membuka acara pembinaan atlas taktual. Diharapkan pembinaan atlas taktual dapat menambah wawasan spasial bagi siswa tunanetra maupun tenaga pendidik. [Zidni Farhati Silmi, 2018]

BIG Dampingi Survei Pengumpulan Data WS Ciliwung Cisadane



Pengumpulan Data di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kab. Tangerang

Pemetaan dinamika sumberdaya alam memandang sumber daya alam sebagai suatu rangkaian proses yang saling berpengaruh. Integrasi antar komponen sumber daya alam (hutan, lahan, air, mineral dan batubara) akan memberikan gambaran pengaruh perubahan antar komponen sumber daya serta implikasinya dalam pengelolaan wilayah secara terpadu.

Wilayah Sungai (WS) Ciliwung Cisadane terbentang pada tiga provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Luas WS Ciliwung Cisadane mencapai 528.719 Ha, terdiri atas 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai

(DAS). Dalam WS Ciliwung Cisadane terdapat dua DAS prioritas yang akan dipulihkan, yaitu DAS Ciliwung dan DAS Cisadane. Kedua DAS tersebut cukup kritis sehingga perlu dilakukan penanganan terpadu berbagai sektor. Terkait kondisi ini, WS Ciliwung dan Cisadane diangkat sebagai lokasi kajian untuk kegiatan Pemetaan Integrasi Neraca Spasial. Survei pengumpulan data awal dilakukan di kedua DAS ini pada bulan Juli 2018.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, tim BIG yang terdiri atas Sri Eka Wati dan Noor Adhi Sakti melaksanakan pendampingan dalam survei pengumpulan data sekunder pada tanggal 2-6 Juli 2018. Tim BIG dan tim konsultan melaksanakan pengumpulan data pada beberapa instansi terkait baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan

Pusat Statistik, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

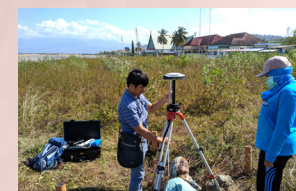
Pada survei kali ini, telah terkumpul beberapa data penting untuk pemetaan integrasi neraca spasial, antara lain pos duga air, debit sungai, irigasi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kabupaten/kota dalam angka. Data tersebut akan digabungkan dengan data hasil interpretasi citra satelit dan untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam analisis neraca spasial 4 komponen sumber daya alam dan integrasi antar komponen sumber daya. [Sri Eka Wati, 2018]



Pengumpulan Data di Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Resensi Buku

Tim PPTRA Ukur GCP Kota Bima dan Sekitarnya



Kegiatan Survei di Kota Bima

Kegiatan survei uji akurasi merupakan bagian dari bentuk bantuan teknis yang dilakukan oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) BIG dalam penyusunan Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bima. Kegiatan ini dilaksanakan atas permohonan bantuan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Aktivitas uji akurasi bertujuan untuk mengumpulkan koordinat titik kontrol berupa *Ground Control Point* (GCP) melalui survei pengukuran GPS.

Survei pengukuran GPS telah dilaksanakan tanggal 10 hingga 13 Juli 2018. Area yang disurvei tidak hanya di sekitar Kota Bima, namun mencakup beberapa lokasi di Kabupaten Bima. Secara keseluruhan ada 55 titik GCP yang desainnya telah disesuaikan dengan cakupan Citra *Pleiades* tahun 2017 sebagai sumber data dalam penyusunan Peta RDTR. Proses pengukuran menggunakan titik D1204 yang berada di Kawasan Bandara Sultan Muhammad

Salahuddin Bima sebagai titik referensi

Penyusunan Peta RDTR Kota Bima sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota sejak tahun 2015. Pemerintah Kota Bima sudah melakukan proses pengukuran titik GCP sebelumnya, namun kejadian banjir bandang yang terjadi tahun 2017 mengakibatkan sumber data yang sudah disiapkan tidak bisa digunakan. Kejadian bencana alam menyebabkan kondisi eksisting wilayah Kota Bima mengalami perubahan yang cukup mempengaruhi perencanaan detail tata ruangnya sehingga diperlukan sumber data baru. Proses penyusunan Peta RDTR Kota Bima dimulai kembali pada tahun 2018, namun dengan kondisi sumber data yang belum terorthorektifikasi. [Iman Sadesmesli, 2018]



GPS

PERAN KEARIFAN LOKAL DAN MODAL SOSIAL DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PEMBANGUNAN PESISIR

Modal sosial dalam kaitannya dengan kearifan lokal dapat berperan dalam rangka melakukan adaptasi terhadap dinamika wilayah pesisir. Selain itu turut memberikan respons dalam rangka pengurangan risiko terhadap dampak dari proses fisik dan dinamika wilayah pesisir atau dikenal sebagai bahaya pesisir. Buku ini hadir sebagai salah satu referensi dalam mengidentifikasi bentuk kearifan lokal dan modal sosial dalam entitas masyarakat tradisional, terutama dalam hal respons masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan. Fungsi buku ini juga menjadi bagian referensi dalam upaya pengurangan risiko bencana sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Kepakaran penulis, Prof Dr Aris Marfai, tidak diragukan lagi karena beliau adalah Guru Besar Geografi UGM, sehingga buku ini layak dibaca berbagai pihak yang mendalami kebumih dan geospasial, termasuk budaya. Pada bagian awal buku, membahas tentang

Dinamika Wilayah Pesisir, Modal Sosial, dan Pengurangan Risiko Bencana. Bagian selanjutnya lebih spesifik contoh kasus yaitu pembahasan tentang Pengenalan Karakteristik dan Dinamika Pesisir: Menuju Identifikasi Kearifan Lokal dan Modal Sosial (Studi Kasus Pesisir Demak). Pada bagian akhir membahas mengenai Peran Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pengurangan Risiko Bencana.

Beberapa hal ilmiah dan contoh kasus dalam buku ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menetapkan arah kebijakan pengembangan wilayah pesisir serta meningkatkan kewaspadaan. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, buku ini cukup menarik terutama dalam pengembangan metode riset terintegrasi antara dinamika fisik kepesisiran dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. [Adinda Cempaka, 2018]



Judul Buku : Peran Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan Pesisir
Penyusun : Muh Aris Marfai, Esti Rahayu, Annisa Triyanti
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Halaman : xvi + 188 Halaman
Tahun Terbit : 2018